DINAMIKA PEMBENTUKAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU 2024

Rizky Fitrianti

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
rizkyfitrianti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika pembentukan koalisi partai politik dalam pemilu 2024 di Indonesia yang ditandai dengan munculnya tiga koalisi besar untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden. Koalisi ini terbentuk sebagai tanggapan terhadap sistem presidensial multipartai yang memerlukan kolaborasi partai-partai politik untuk menciptakan pemerintahan yang stabil. Studi ini berfokus pada dua aspek utama yakni apakah pembentukan koalisi lebih mengarah pada konsolidasi kekuasaan atau kemitraan demokratis, dan apa implikasi koalisi besar terhadap kualitas demokrasi khususnya terkait mekanisme *check and balances*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan data sekunder dari dokumen dan media terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa koalisi dalam pemilu 2024 cenderung didorong oleh pragmatisme politik dan kalkulasi elektoral, sementara kesamaan ideologi menjadi kurang dominan yang mana dapat melemahkan sistem *check and balance* serta memperkuat oligarki meskipun terdapat upaya membangun konsensus program antar partai, langkah ini masih belum kuat untuk menyeimbangkan konsolidasi kekuasaan.

Kata Kunci : Koalisi Partai Politik, dan Pemilu 2024

Abstract

This research discusses the dynamics of political party coalition formation in the 2024 elections in Indonesia, which is characterized by the emergence of three major coalitions to support presidential and vice presidential candidates. These coalitions were formed in response to a multiparty presidential system that requires the collaboration of political parties to create a stable government. This study focuses on two main aspects, namely whether the formation of coalitions leads to power consolidation or democratic partnerships, and what are the implications of grand coalitions for the quality of democracy, especially related to the mechanism of checks and balances. This research uses a qualitative-descriptive approach with secondary data from relevant documents and media. The results show that coalitions in the 2024 elections tend to be driven by political pragmatism and electoral calculations, while ideological similarities become less dominant, which can weaken the check and balance system and strengthen the oligarchy. Although there are efforts to build consensus programs between parties, this step is still not strong enough to balance power consolidation.

Keywords : Political Party Coalition, and 2024 Election

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan tonggak penting dalam proses demokrasi sebuah negara. Di Indonesia, pemilihan umum 2024 menjadi momen yang krusial dengan ditandai persaingan politik yang sengit serta antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Di Indonesia, pemilu sering kali menjadi momentum penting yang menentukan arah kebijakan dan pembangunan negara. Pergantian pemimpin negara akan diikuti oleh konfigurasi para elit politik dan pengusaha di sekelilingnya¹. Partai-partai politik dan kelompok bisnis tentunya menyadari pentingnya segera mengambil langkah agar tidak terlambat dalam memberikan pengaruh dalam pemilihan presiden yang akan datang untuk kepentingan politik dan bisnis mereka. Partai politik memegang peranan penting di dalam parlemen atau lembaga legislatif yang nantinya secara bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan menentukan arah dan tujuan suatu negara². Partai politik merupakan salah satu institusi sekaligus pilar demokrasi perwakilan serta dituntut untuk berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara aspirasi dan kepentingan rakyat dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, hanya partai politik yang berwenang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Sejak tahun 2005, melalui UU No. 32 Tahun 2004, otoritas partai politik semakin diperluas untuk mengusung calon kepala daerah. Selain itu, partai politik di DPR juga memiliki kewenangan dalam seleksi pejabat publik melalui jalur elektoral dan non-elektoral³.

Pemilu 2024 menandai awal terbentuknya koalisi partai politik yang lebih terstruktur, meskipun masih didominasi oleh kepentingan jangka pendek dan pragmatisme politik. Fenomena tersebut tidak terlepas dari sistem presidensial multipartai yang dianut Indonesia. Sistem multi-partai yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan pengotak-atikan kekuasaan di dalam legislatif yang dikhawatirkan akan melemahkan sistem pemerintahan dan menimbulkan perpecahan antara eksekutif dan legislatif. Berdasarkan pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 yang mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh 2 (dua) parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi syarat 20% kursi parlemen atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam pemilihan anggota parlemen. Syarat tersebut menegaskan bahwa tidak semua partai dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan ini dijadikan dasar para koalisi parpol pengusung dimana akan terjadi negosiasi dalam koalisi tersebut, sehingga mendorong terbentuknya koalisi besar (*grand coalition*)⁴.

¹ Salsa Agustin et al., "Dinamika Ketegangan Politik Pasca Pemilu 2024 Dalam Mempertahankan Stabilitas Demokrasi Di Indonesia," *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 02 (2024): 235–52.

² Djoni Gunanto et al., "DINAMIKA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024 Sawala Pemilu Serentak Tahun 2024 Akan Dilaksanakan Tanggal 14 Februari 2023 . Berbagi Tema Pemilihan Presiden Langsung (Pilpr," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4039, no. May (2024): 57–67.

³ Syamsuddin Haris, *Menuju Reformasi Partai Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020).

⁴ Thimoty Pradhitya Isaliani and Sunny Ummul Firdaus, "Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia," *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 221–32.

Koalisi besar menjadi tidak terhindarkan dalam pemilu 2024 karena adanya persyaratan politik, namun hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia.

Menurut penelitian terdahulu, karya Yosef Evan menjelaskan bahwa pembentukan koalisi partai politik yang terorganisir dalam pemilu lebih mengarah pada upaya konsolidasi kekuasaan. Hal tersebut terlihat dari pernyataan bahwa konsisten di tingkat lokal cenderung pragmatis dan tidak terlalu memperhatikan garis ideologi dan platform partai, tetapi lebih kepada perebutan kekuasaan. Selain itu, terdapat argumentasi bahwa pragmatisme dalam pembentukan koalisis terjadi karena lemahnya pelembagaan partai dan orientasi jabatan atau kekuasaan⁵.

Dinamika pembentukan koalisi partai politik telah menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Hal ini terlihat dari proses negosiasi yang rumit antar partai politik yang tidak hanya mempertimbangkan kesamaan ideologi tetapi juga kekuasaan serta kalkulasi elektoral. Pada pemilu 2024 memperlihatkan pembentukan tiga koalisi besar yang mendukung tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. *Pertama*, 01 yaitu pasangan Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar yang didukung oleh Koalisi Perubahan yang sebelumnya bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan Koalisi Semut Merah (KSM) yang beranggotakan Partai Nasdem, PKB, dan PKS. *Kedua*, 02 yaitu pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau Bersama Indonesia Maju yang beranggotakan Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, dan Partai Garda Republik Indonesia. *Ketiga*, 03 yaitu pasangan Ganjar Pranowo & Mahfud MD yang didukung oleh Koalisi Indonesia Bersatu, PDIP berada dalam koalisi yang mendukung pasangan 03 sebagai calon presiden. Koalisi ini mencakup beberapa partai yaitu PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura⁶.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika pembentukan koalisi partai politik dalam pemilu 2024 dengan berfokus pada dua aspek utama yaitu: Pertama, mengidentifikasi apakah pembentukan koalisi partai politik dalam pemilu 2024 lebih mengarah kepada upaya konsolidasi kekuasaan atau membangun kemitraan yang demokratis. Kedua, apa implikasi dari pembentukan koalisi besar (*grand coalition*) terhadap kualitas demokrasi khususnya konteks *checks and balance* dalam sistem politik Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Metode penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara komprehensif untuk menganalisis dinamika pembentukan koalisi partai politik di Indonesia dengan fokus utama pada pemilu 2024. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau sosiologis. Penelitian ini

⁵ Y E Dinar and H T Ardianto, "Dinamika Koalisi Partai Politik Di Tingkat Lokal: Studi Kasus Koalisi Pdp-pkb Dalam Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2015," *Journal of Politic and Government* ..., 2019, 1–14.

⁶ Ulvia Nur Azizah, "Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024," detikJateng, 2024, <https://www.detik.com/jateng/berita/>.

menggunakan data sekunder berupa studi dokumen, kajian literatur ilmiah, penelusuran *database* online, laporan hasil pemilu dan dokumentasi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

Koalisi Partai Politik

Max Weber dapat dikategorikan sebagai pendiri pemikiran politik modern. Dalam bukunya "*economie et societe*" Max Weber mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnnya berkuasa dan mengizinkan para pendukungnya (politisi) memperoleh keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik merupakan organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik⁷. Dalam karyanya yang berjudul "*Politics as a Vocation*", Max Weber juga menjelaskan bahwa politik dapat dipahami sebagai 'panggilan' yang dapat dijalankan dengan dua cara yaitu hidup 'dari' politik (mendapatkan keuntungan dari politik) atau hidup 'untuk' politik (berdedikasi pada politik karena keyakinan atau tujuan ideal). Para politisi yang hidup dari politik tentunya mencari kompensasi finansial dari keterlibatan mereka, sementara para politisi yang hidup untuk politik melibatkan diri secara idealis tanpa mengharapkan manfaat material langsung⁸. Menurut Ichlasul Amal bahwa partai politik dalam pengertian modern dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga bisa mengawasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah⁹.

Partai politik berperan penting dalam menghubungkan antara kewarganegaraan dengan proses pemerintahan. Kedatangan parpol selaku aset negara pasti sangat diperlukan didalam kehidupan demokrasi modern dalam proses rotasi kekuasaan yang legal. Koalisi partai sering terbentuk berdasarkan dua faktor, yaitu dasar kedekatan kebijakan (*trade-off*) antara tujuan "*office seeking*" dan komitmen terhadap suatu kebijakan. Motivasi koalisi sering terkait dengan kebijakan dan strategi partai, terbentuknya koalisi karena kesamaan tujuan. Namun, jika hanya fokus pada perubahan kekuasaan, langkah ini dianggap pragmatis. Menurut Efriza koalisi yang bertujuan semata-mata hanya untuk kekuasaan disebut dengan koalisi taktik, yang efektif untuk meraih suara tanpa memperhatikan visi bersama yang mendalam¹⁰. Pada dasarnya motif utama partai politik didirikan untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan wewenang pemerintahan. Tidak ada partai yang sukarela memilih menjadi oposisi, karena oposisi dianggap sebagai kecelakaan politik. Oleh karena itu pemenang pemilu seringkali mengajak partai lain untuk bergabung dalam pemerintahan guna memastikan mayoritas di parlemen dan kelancaran pemerintahan¹¹. Pembentukan koalisi besar menjadi strategi yang

⁷ Yoyoh Rohaniah Efriza, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Intans Publishing, 2015).

⁸ Max Weber, "Politics as a Vocation (Politik Als Beruf)," *From Max Weber: Essays in Sociology*, 1946, 77–128.

⁹ A. Gau Kadir, "Dinamika Partai Politik Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014): 132–36.

¹⁰ Moh. Ainul Yakin dan Sri Budi Eko Wardani, "Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Machfus Arifin Dan Mujiaman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 7, no. 2 (2021).

¹¹ FISIP UI, "Konsolidasi Untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi Atau Koalisi?," in *Yusuf Kalla* (Depok: FISIP UI, 2024).

umum untuk meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilu. Koalisi besar ini diharapkan dapat menguntungkan Indonesia dengan konsolidasi yang lebih kuat di tingkat *grassroot*. Namun, koalisi besar tidak selalu menjamin kemenangan, karena masih ada kerumitan dalam menentukan bakal capres-cawapres dan dinamika-dinamika politik lainnya¹².

Dinamika Pembentukan Koalisi Partai Politik

Koalisi merupakan kerja sama antar partai politik untuk mencapai tujuan bersama, seperti dalam menjalankan pemerintahan. Dalam demokrasi perwakilan, kemampuan membentuk koalisi yang sukses sangatlah penting karena tidak ada aktor politik yang dapat berkuasa tanpa dukungan. Masyarakat terbuka mendorong kolaborasi antara berbagai aktor politik, meskipun sering terjadi perbedaan pendapat akibat keberagaman konstituen. Dalam sistem parlementer, koalisi pemerintah biasanya terdiri dari partai-partai yang berperilaku kohesif meskipun memiliki pandangan berbeda. Koalisi yang lebih fleksibel memungkinkan anggota legislatif mendukung kebijakan sesuai keyakinan mereka tanpa terikat pada isu yang tidak terduga, sehingga meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan¹³. Durasi dan bentuk koalisi bervariasi tergantung pada kepentingan, dukungan, dan sistem pemerintahan. Dalam sistem parlementer multipartai, koalisi umum terjadi karena diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang stabil di tengah fragmentasi hasil pemilu. Namun, koalisi sering kali menjadi kompromi politik demi kekuasaan, sehingga gesekan antar partai yang terlibat tidak terhindarkan.

Namun, koalisi tidak selalu ideal, keputusan para elit politik sering kali tidak sejalan dengan tujuan kolektif menjadikannya sebagai kompromi politik yang menghadapi gesekan antar partai. Dinamika koalisi pemerintahan menunjukkan bahwa persaingan antar partai dalam merebut kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam koalisi dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan demokrasi secara keseluruhan. Dinamika politik Pilpres 2024 mencuat karena penerapan *presidential threshold* 20%. Penerapan ini masih menyisakan problematika dimana ambang batas capres dan cawapres paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau mendapat suara sah sebanyak 25% dari Pemilu DPR sebelumnya. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa *Presidential Threshold* merusak demokrasi, hak parpol lain, membatasi hak rakyat dalam pemilihan capres dan cawapres serta hanya akan tumbuh subur memberdayakan para elit besar. *Presidential threshold* hanya sebagai dalih dalam memperkokoh sistem presidensial, dibalik itu ada permainan elit politik bertujuan untuk melakukan seleksi terhadap sejumlah calon yang akan dimajukan dalam konteks pemilihan presiden¹⁴.

Dualisme Kekuasaan Politik

Indonesia merupakan negara yang menempatkan koalisi sebagai bagian kekuatan parpol dalam pertarungan merebut kekuasaan mulai bupati/walikota

¹² BBC News Indonesia, "Koalisi Besar Di Pemilu 2024: Apakah Bisa Jadi Jaminan Kemenangan?," BBC News Indonesia, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/>.

¹³ Carles dan Susan C. Stokes Boix, *Teori Koalisi Dan Pembentukan Pemerintahan: Handbook Perbandingan Politik* (Yogyakarta: Nusamedia, 2021).

¹⁴ Bayujati Prakoso, Rif'atul Himmah, and Fajar Kurnia Illahi, "Dinamika Politik Menuju Pemilihan Presiden 2024 Di Indonesia: Studi Social Network Analysis," *Jurnal Lanskap Politik* 1, no. 3 (2023): 107.

sampai presiden. Koalisi diciptakan di antara partai politik di Indonesia tidak kaku dan cenderung fleksibel, dikarenakan koalisi lebih mengutamakan pada kesamaan kepentingan bersama dalam memperoleh kekuasaan. Kekuatan koalisi yang dibangun parpol pada pemilihan presiden berasal dari pada kekuatan penguasaan parlemen. Koalisi parpol merupakan suatu kepentingan dalam pergelaran pemilu presiden maupun perebutan kekuasaan di legislatif, sehingga dapat dinyatakan bahwa koalisi parpol sangat berpengaruh dalam jalannya roda pemerintahan. Koalisi sangatlah berpengaruh dalam perhelatan perpolitikan dalam pemerintahan di Indonesia, karena sangat mempengaruhi dalam hubungan antara eksekutif serta legislatif. Pembentukan serta tahapan koalisi baik dalam proses pemilihan dan tahapan perancangan pemerintahan ataupun dalam perancangan fraksi maupun gabungan fraksi di DPR memiliki suatu kelemahan masing-masing yang dikarenakan daya ikat atau lebih dikenal dengan perjanjian politik antar partai tidak kuat dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sering muncul anggapan dimana koalisi merupakan karakteristik dari sistem parlementer. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kompromi kekuasaan antara presiden dengan koalisi pendukungnya dan hal ini juga mempengaruhi keputusan daripada pemerintahan yang akan menyebabkan kurang efektifnya roda pemerintahan¹⁵.

Pembentukan koalisi partai politik dalam pemilu 2024 menunjukkan kombinasi antara upaya konsolidasi kekuasaan dan membangun kemitraan yang demokratis. Namun, berdasarkan analisis para pakar, aspek konsolidasi kekuasaan lebih tampak dominan karena pragmatisme politik yang tinggi, kalkulasi elektoral yang lebih diutamakan dibanding kesamaan ideologi, dan pola transaksional dalam pembentukan koalisi. Indikator konsolidasi kekuasaan dalam pembentukan koalisi pada pemilu 2024 dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu: **Pertama**, pola pembentukan koalisi cenderung berbasis elektabilitas, bukan kesamaan ideologi. Prof. Djayadi Hanan menyatakan bahwa koalisi lebih ditujukan untuk mengamankan kekuasaan daripada berbagi visa politik. **Kedua**, pragmatisme politik mendominasi. Partai-partai yang sebelumnya berseberangan kini bisa bergabung dalam koalisi yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Kuskridho Ambardi bahwa ideologi tidak lagi menjadi faktor penentu utama. **Ketiga**, koalisi dibentuk untuk mengoptimalkan penguasaan sumber daya politik. Syamsuddin Haris dari LIPi mencatat adanya upaya memonopoli sumber daya, seperti jaringan politik daerah, pendanaan, dan akses media. **Keempat**, pola transaksional juga terlihat dengan indikasi adanya tawar-menawar posisi dalam pembentukan koalisi. Burhanuddin Muhtadi mencatat fenomena “*political dowry*” atau mahar politik sebagai bagian dari dinamika ini. Implikasinya adalah pelemahan sistem *checks and balances* dimana koalisi besar berpotensi mengurangi pengawasan antarpol, membuka peluang bagi oligarki. Selain itu, partai kecil semakin terpinggirkan dan isu ideologis kian depolitisasi dengan perdebatan politik yang lebih berfokus pada pembagian kekuasaan ketimbang diskusi kebijakan yang substantif¹⁶.

Kondisi demikian pernah dialami oleh rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Di Tahun 2004, SBY-JK terpilih sebagai presiden

¹⁵ Syamsuddin Haris, *Menuju Reformasi Partai Politik*.

¹⁶ Syamsuddin Haris.

dari partai demokrat dengan jumlah dukungan 10,5% (57 kursi). Komposisi ini membuat presiden berada pada pola 'minoritas'. Kecenderungan ini membuat presiden mau tidak mau merangkul sebagian besar dukungan mayoritas partai demi menjamin sekuritas politik. Kondisi ini kembali berulang di tahun 2009 pada saat kepemimpinan periode kedua SBY-Boediono. Presiden kembali merangkul mayoritas partai politik yang ada di parlemen sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Tidak berbeda dengan SBY, pemerintahan Jokowi pada periode pertama dan kedua memperlihatkan gejala yang sama. Meskipun di tahun 2014, pemerintahan Jokowi sempat berada di pola 'minoritas'. Dengan dukungan minoritas, presiden kesulitan membangun program-program pemerintahan. Akhirnya Jokowi merangkul kekuatan partai politik secara mayoritas demi menjaga stabilitas pemerintahan¹⁷.

Meskipun demikian, perkembangan positif ke arah demokrasi juga mulai terlihat. Ini termasuk upaya yang lebih serius dalam membangun konsensus program antar partai koalisi dengan adanya diskusi substantif antar partai koalisi mengenai program pemerintah. Selain itu, pembentukan koalisi mulai lebih terstruktur dengan mekanisme deliberatif dengan meningkatnya intensitas komunikasi antar partai dalam proses koalisi. Adanya upaya para partai untuk merespon ekspektasi dari pemilih dalam pembentukan koalisi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, elemen-elemen kemitraan demokratis ini masih belum cukup kuat untuk dapat mengimbangi kecenderungan konsolidasi kekuasaan¹⁸.

Politik Kartel

Dr. H. Jazilul Fawaid, wakil ketua MPR periode 2019-2024, menekankan bahwa konsolidasi demokrasi adalah kunci untuk mencapai Indonesia yang demokratis. Dalam bukunya, Kuskridho Ambardi menjelaskan bahwa setelah reformasi, partai-partai di Indonesia membentuk sistem kepartaian yang menyerupai kartel, dengan lima ciri utama: hilangnya peran ideologi partai dalam perilaku koalisi, sikap permisif dalam pembentukan koalisi, tidak adanya oposisi, hasil pemilu yang tidak berpengaruh pada perilaku partai, dan kecenderungan partai untuk bertindak kolektif. Ciri-ciri ini bertentangan dengan sistem kepartaian yang kompetitif, di mana partai-partai lebih memilih untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif dengan membentuk kartel yang bergantung pada sumber keuangan dari pemerintah. Ketergantungan ini muncul karena menurunnya kemampuan partai untuk mengumpulkan dana dari anggota, sehingga mereka lebih mendekat ke negara dan menjauh dari masyarakat¹⁹.

Slater menawarkan satu pemikiran yang agak mirip dengan kartelisasi di Indonesia yaitu demokrasi Indonesia menderita apa yang disebut sebagai 'jebakan pertanggungjawaban'. Jebakan ini muncul karena parpol gagal menjalankan fungsi pengawasan perimbangan (*checks and balances*) di tingkat pemerintahan. Lebih jauh dia mengatakan, kartel partai itu mampu merebut rantai ekonomi yang dimiliki para menteri melalui kontrolnya atas kabinet. Ketika di satu partai merah kursi

¹⁷ Idul Rihsan, *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII, 2020).

¹⁸ Isaliani and Firdaus, "Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia."

¹⁹ Kuskrido Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel. Studi Tentang Sitem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009).

parlemen, sangat mungkin partai mengambil tindakan berdasarkan pilihan ideologisnya dan kepentingan yang diwakilinya di parlemen. Bila partai membutuhkan koalisi maka akan bergabung dengan partai-partai yang memiliki ideologi sama. Namun, ketika berbicara dalam dunia realitas, begitu pemilu berakhir partai-partai memperlihatkan jenis interaksi yang sungguh berbeda, jarak ideologis diantara mereka menghilang dan persaingan berhenti begitu pemilu usai.

Tujuan utama dari perjuangan partai kartel bukanlah kepentingan masyarakat tetapi untuk kepentingan kelompoknya. Kepentingan masyarakat seringkali terpinggirkan, dikarenakan ketergantungan partai kartel yang semakin besar kepada negara. Wujudnya partai kartel ditandai dengan bergabungnya partai-partai politik dalam satu koalisi besar partai pemerintah yang didukung dan menjaga jalannya pemerintahan yang terpilih hingga akhir. Partai kartel yang berwujud di Indonesia diyakini sebagai sumber utama terjadinya korupsi politik yang melibatkan elit politik Indonesia. Tidak adanya sistem *checks and balances* yang berkelanjutan dalam sistem pemerintahan di Indonesia akan memberikan peluang besar bagi berlakunya praktik korupsi politik di pemerintahan dan parlemen, hal ini terjadi untuk memenuhi kepentingan kelompok partai kartel akan sumber dana yang bergantung pada negara sehingga menjadikan korupsi sebagai jalan pintasnya²⁰.

Implikasi *Grand Coalition* dalam Sistem Politik Indonesia

Pembentukan koalisi besar (*grand coalition*) dalam partai politik di Indonesia dapat menyebabkan dampak yang signifikan pada kualitas demokrasi terutama dalam mekanisme *checks and balances*. Salah satu resikonya adalah lemahnya oposisi yang efektif ketika banyak partai yang bergabung dalam koalisi pemerintah, menjadikan ruang untuk pengawasan dan kritik menjadi terbatas, mengakibatkan oposisi yang tersisa tidak dapat berfungsi optimal sebagai penyeimbang kekuasaan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan mengurangi kualitas demokrasi. Pengamat politik mencatat bahwa Indonesia menunjukkan paradoks dimana mekanisme demokrasi dan oligarki dapat hidup berdampingan. Pola hubungan antara eksekutif dan legislatif juga belum mencerminkan demokrasi yang solid, melainkan cenderung menunjukkan relasi kartel politik yang saling menguntungkan, sehingga kontrol terhadap kekuasaan tidak berjalan efektif. Dalam sistem pemerintahan ideal, *checks and balances* mencegah penyalahgunaan kekuasaan tetapi dengan koalisi besar, kolusi antar lembaga pemerintah meningkat, melemahkan fungsi legislatif dan yudikatif dalam mengawasi eksekutif. Selain itu, koalisi besar menyulitkan akuntabilitas publik, membuat pemilih sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tertentu, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan jika kebijakan tidak memenuhi harapan masyarakat²¹.

Jimly Asshidiqie menjelaskan tujuan adanya *checks and balances* adalah agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga

²⁰ Yeni Sri Lestari, "Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia," *Pandecta* 12, no. 1 (2017): 72–80.

²¹ Sunarto Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157.

negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Dalam perkembangannya sistem *checks and balances* kemudian menjadi salah satu dalam mewujudkan serta membangun pemerintahan yang bersifat demokratis. (*democratic and egalitarian*). Selain itu mendukung perwujudan prinsip *good society* dan *good government* melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang harmonis di antara pilar-pilar kekuasaan yang ada dalam negara²². Anggota MPR Firman Soebagyo menjelaskan bahwa konsolidasi kekuasaan di DPR sudah sangat jelas yakni adanya koalisi parpol yang mendukung calon presiden dan wakil presiden, dan koalisi kubu oposisi. Menurutnya konsolidasi politik di MPR juga sangat penting sebab di lembaga negara saat ini sangat menentukan dalam pengawalan konstitusi. Ia juga mengkhawatirkan bahwa *power sharing* akan melemahkan *checks and balances*. Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro menyebutkan bila koalisi besar terjadi maka akan membuat sistem *executive heavy*. Bila *executive heavy* terbangun maka *checks and balances* akan susah terjadi. Koalisi besar dapat menurunkan kualitas demokrasi dengan mengurangi efektivitas *checks and balances*. Ketika kekuasaan eksekutif dan legislatif terlalu terpusat dalam satu koalisi, proses *checks and balances* menjadi lemah. Hal ini dapat berakibat pada kebijakan yang tidak terkontrol dan kurangnya akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat²³.

Jika koalisi gemuk (*grand coalition*) dilegitimasi sebagai syarat lahirnya stabilitas pemerintahan, kenyataannya tidaklah dapat dibenarkan sepenuhnya. Koalisi gemuk juga melahirkan resiko politik dan problem ketatanegaraan yang tidak sederhana. Ada tiga problem mendasar yang muncul sebagai akses pembentukan koalisi gemuk dalam sistem presidensial. *Pertama*, pemerintahan cenderung bersifat kompromistis. Akibat meleburnya kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden menjadi sangat akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan partai politik. Kondisi ini semakin diperparah dengan karakter kepartaian yang masih bersifat rente dan transaksional. Bagi-bagi kursi terhadap jabatan setingkat menteri dilakukan dengan mode 'politik dagang sapi'. Di masing-masing periode SBY dan Jokowi, pengisian jabatan setingkat menteri masih saja didominasi antara pertarungan kalangan profesional dan utusan partai politik. *Kedua*, bahwa koalisi gemuk tidak sepenuhnya menjamin stabilitas pemerintahan khususnya pada relasi Presiden dan DPR. *Ketiga*, koalisi gemuk bisa menjadi jebakan otoritarian. Akibat mayoritas partai politik di DPR bersekutu dengan pemerintahan, Presiden tidak hanya menjadi episentrum kekuasaan eksekutif, tetapi juga menjelma sebagai pengendali kekuatan partai-partai politik yang ada di parlemen. Kecenderungan ini menyebabkan pemerintahan menjadi sangat mudah terperangkap pada rezim otoritarian²⁴.

Pembentukan koalisi besar dalam politik di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi terutama fungsi *checks and balances*. Minimnya oposisi yang efektif dalam koalisi besar beresiko menciptakan

²² MPR RI, "Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Badan Pengkajian MPR RI 1* (2017): viii–251.

²³ Tempo, "Koalisi Jangan Lemahkan Checks and Balances," Tempo.co, 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1215484/>.

²⁴ Rihsan, *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*.

“demokrasi tanpa oposisi” yang mengurangi ruang untuk mengkritik dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Perdebatan kebijakan di parlemen juga cenderung kurang substantif karena dominasi koalisi besar mengakibatkan lembaga legislatif hanya menjadi *rubber stamp*. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan politik, dengan eksekutif menjadi sangat dominan. Disisi lain, koalisi besar memicu kartelisasi politik, dimana partai-partai besar cenderung membentuk oligarki dan melemahkan akuntabilitas. Akibatnya, suara-suara kritis termasuk kelompok minoritas kesulitan mendapatkan representasi yang memadai. Selain itu, koalisi besar juga cenderung mengurangi perdebatan ideologis dan kebijakan substantif, menciptakan stagnasi dalam pembentukan kebijakan. Dalam jangka panjang, koalisi besar dapat mempercepat legislasi tetapi mengurangi kualitas pengawasan dan memfokuskan partai politik pada pembagian kekuasaan alih-alih memperjuangkan kepentingan publik. Untuk menjaga keseimbangan demokrasi diperlukan penguatan lembaga pengawas seperti MK dan KPK serta reformasi ambang batas parlemen (*electoral threshold*) guna meningkatkan keseimbangan representasi politik.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pembentukan koalisi partai politik dalam Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana pragmatisme politik dan kalkulasi elektoral menjadi faktor dominan. Koalisi besar (*grand coalition*) lebih cenderung difokuskan pada konsolidasi kekuasaan dibandingkan membangun kemitraan demokratis yang kuat. Hal ini tercermin dari pola pembentukan koalisi yang tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih pada elektabilitas dan penguasaan sumber daya politik. Meskipun koalisi besar diharapkan dapat menciptakan stabilitas pemerintahan, ada risiko serius terhadap kualitas demokrasi. Mekanisme *checks and balances* dapat melemah akibat dominasi kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan beberapa partai besar. Selain itu, fenomena kartelisasi politik semakin memperkuat oligarki, yang berpotensi mengurangi peran oposisi serta mempersempit ruang untuk pengawasan yang efektif terhadap pemerintah. Namun demikian, ada tanda-tanda positif dalam upaya membangun konsensus program antar partai, yang berpotensi memperkuat aspek kemitraan demokratis. Meski demikian, elemen ini masih belum cukup kuat untuk menyeimbangkan kecenderungan konsolidasi kekuasaan. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan menjaga kualitas demokrasi melalui sistem *checks and balances* yang efektif.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan model teoritis yang bisa digunakan untuk mempresiksi pembentukan dan keberlangsungan koalisi partai politik dimasa mendatang. Serta melakukan penelitian longitudinal untuk memantau perubahan dinamika koalisi partai politik dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Salsa, Rizki Maharani, Rizki Ramadhani, and Universitas Kader Bangsa. "Dinamika Ketegangan Politik Pasca Pemilu 2024 Dalam Mempertahankan Stabilitas Demokrasi Di Indonesia." *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 02 (2024).
- Ambardi, Kuskrido. *Mengungkap Politik Kartel. Studi Tentang Sitem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- BBC News Indonesia. "Koalisi Besar Di Pemilu 2024: Apakah Bisa Jadi Jaminan Kemenangan? ." *BBC News Indonesia*, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/>.
- Boix, Carles dan Susan C. Stokes. *Teori Koalisi Dan Pembentukan Pemerintahan: Handbook Perbandingan Politik*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Danar, Y E, and H T Ardianto. "Dinamika Koalisi Partai Politik Di Tingkat Lokal: Studi Kasus Koalisi Pdp-Pkb Dalam Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2015." *Journal of Politic and Government ...*, 2019.
- FISIP UI. "Konsolidasi Untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi Atau Koalisi?" In *Yusuf Kalla*. Depok: FISIP UI, 2024.
- Gunanto, Djoni, Syafriyana Hijri, Putri Hana, and Djoni Gunanto. "DINAMIKA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024 Sawala Pemilu Serentak Tahun 2024 Akan Dilaksanakan Tanggal 14 Februari 2023 . Berbagi Tema Pemilihan Presiden Langsung (Pilpr." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4039, no. May (2024).
- Isaliani, Thimoty Pradhitya, and Sunny Ummul Firdaus. "Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia." *Res Publica* 4, no. 2 (2020).
- Kadir, A. Gau. "Dinamika Partai Politik Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014).
- Lestari, Yeni Sri. "Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia." *Pandecta* 12, no. 1 (2017).
- Moh. Ainul Yakin dan Sri Budi Eko Wardani. "Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Machfus Arifin Dan Mujiaman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 7, no. 2 (2021).
- MPR RI. "Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Badan Pengkajian MPR RI* 1 (2017): viii–251.
- Prakoso, Bayujati, Rif'atul Himmah, and Fajar Kurnia Illahi. "Dinamika Politik Menuju Pemilihan Presiden 2024 Di Indonesia: Studi Social Network Analysis." *Jurnal Lanskap Politik* 1, no. 3 (2023).
- Rihsan, Idul. *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII, 2020.
- Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157.
- Syamsuddin Haris. *Menuju Reformasi Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Tempo. "Koalisi Jangan Lemahkan Checks and Balances." *Tempo,co*, 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1215484/>.

- Ulvia Nur Azizah. "Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024." detikJateng, 2024.
<https://www.detik.com/jateng/berita/>.
- Weber, Max. "Politics as a Vocation (Politik Als Beruf)." *From Max Weber: Essays in Sociology*, 1946, 77–128.
- Yoyoh Rohaniah Efriza. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intans Publishing, 2015.